

BAB

II

**GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH**



RENSTRA

KECAMATAN PUCAKWANGI

KABUPATEN PATI

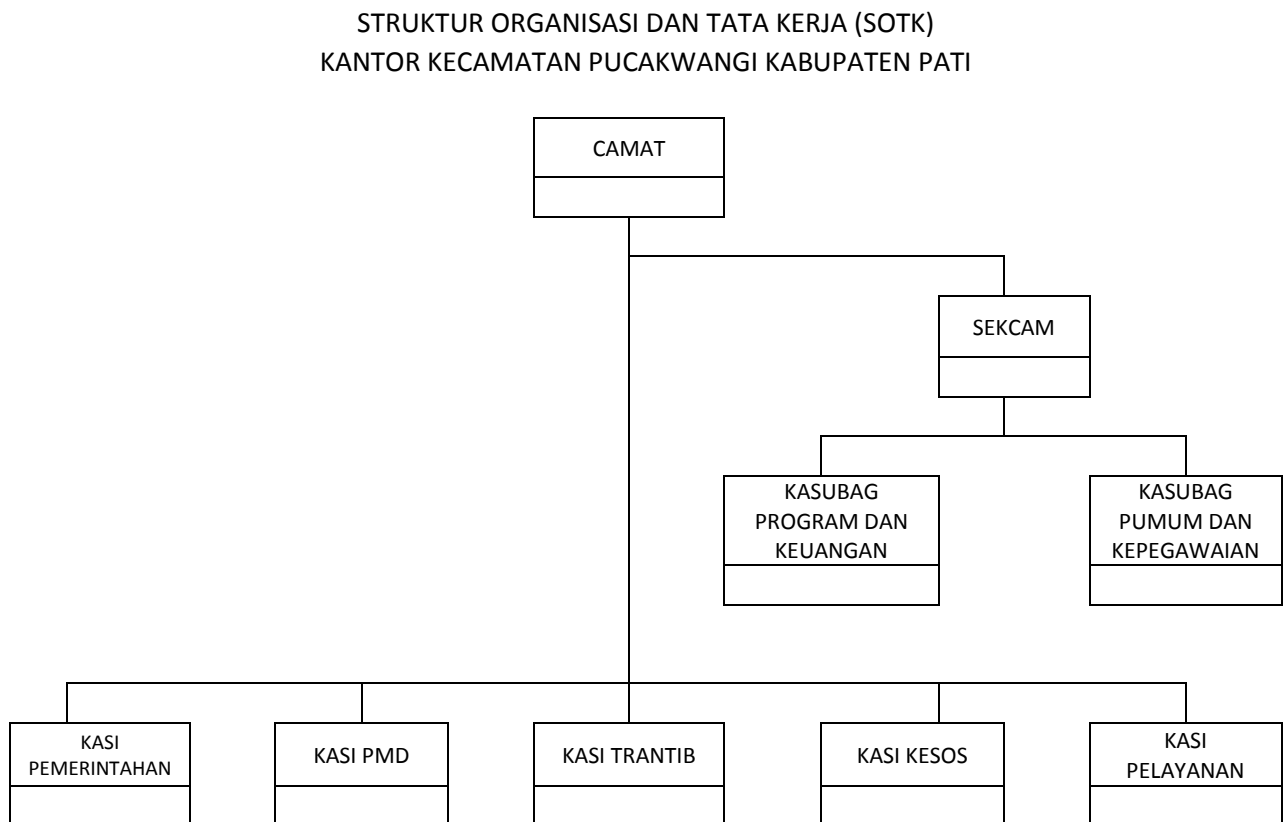
2017 – 2022

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pucakwangi

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Pucakwangi terdiri atas:



Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pucakwangi

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;

- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa

		lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.

4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dan pengesahan anggota Badan Permasyarakatan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi.
---	-----------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).
--	--	---

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.

Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2016

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Pucakwangi berjumlah 17 orang, terdiri dari 12 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Pucakwangi	2		3	4	1	2	12	
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	
	- Sekcam	1						1	
	- Kasubag Program & Keu			1				1	
	- Kasubag Umum & Kepeg			1				1	
	- Kasi PMD			1				1	
	- Kasi Trantib			1				1	
	- Kasi Kesos			1				1	
	- Kasi Pelayanan			1				1	
	- Kasi Pemerintahan				1			1	
	- Staf Pemerintahan					1		1	
	- Staf Subbag Program & Keuangan						1	1	
	Staf Pelayanan umum					1		1	
	- Satpol PP					3		3	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2016

Tabel II.4**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	<SLT P		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Pucakwangi			1	1		1	4	4	1		6	6
	- Camat									1		1	
	- Sekcam									1		1	
	-Kasubag Program & Keu							1				1	
	-Kasubag Umum & Kepeg							1				1	
	- Kasi PMD							1				1	
	- Kasi Trantib							1				1	
	- Kasi Kesos							1				1	
	-Kasi Pelayanan								1			1	
	-Kasi Pemerintahan							1				1	
	-Staf Pemerintahan					1						1	
	-Staf Program dan keuangan				1							1	
	- Staf Yanum			1								1	
	- Satpol PP			3								3	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2016

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.5
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	3	unit	Baik	
2	Ruangan	4	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	10	unit		
		9	unit	Baik	
		1	unit	Kurang Baik	
	peralatan kerja :		unit		
5	- Komputer	6	unit	baik,	
6	- Laptop	5	unit	4 baik, 1 kurang baik	
7	- Printer	4	unit	3 baik, 1 kurang baik,	
8	- Meja	24	unit	21 baik, 3 kurang baik	
9	- Kursi	128	unit	120 baik, 8 kurang baik	
10	- AC	6	unit	baik	
11	- Almari	7	unit	5 baik, 2 kurang baik	
12	- Filling cabinet	3	Unit	2 baik, 1 kurang baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2016

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 5 unit dengan kondisi baik

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 6 unit dengan 4 dalam kondisi baik dan 2 kondisi rusak, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 7 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 4 unit dengan 3 dalam kondisi baik, 1 kondisi kurang baik, maka ke depan

masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 5 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 24 unit dengan 21 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik,

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 128 unit dengan 120 dalam kondisi baik dan 8 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 5 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 7 unit dengan 1 kondisi kurang baik.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 7 unit dengan 2 dalam kondisi kurang baik.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 3 unit dengan 2 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 3 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filling cabinet dan penggantian filling cabinet yang kurang baik dan rusak.

2.2.3. Kondisi umum Kecamatan Pucakwangi

2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Pucakwangi merupakan salah satu dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah yang terletak 29 (dua puluh sembilan) km arah Tenggara dari Ibukota Kabupaten Pati dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah utara : Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati
- Sebelah Timur : Kecamatan Jaken Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kecamatan Todanan Kabupaten Blora
- Sebelah Barat : Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Luas Kecamatan Pucakwangi ± 12.283.000 ha dan secara administratif Kecamatan Pucakwangi terdiri dari 20 (dua puluh) desa dengan jumlah penduduk ± **47.919** jiwa



Peta Kecamatan Pucakwangi

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Pucakwangi dapat dilihat dalam tabel II.6 berikut ini :

Tabel II.6

Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Pucakwangi

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	Pucakwangi	896,01	32	4	
2	Mojoagung	891,57	12	4	
3	Lumbangmas	996,18	29	3	
4	Sitimulyo	1,238,99	22	7	
5	Kletek	1,011,99	10	3	
6	Terteg	217,01	14	3	
7	Mencon	871,34	10	2	
8	Pelengede	324,65	22	5	
9	Sokopuluhan	613,30	30	5	
10	Tegalwero	281,43	13	3	
11	Tanjungsekar	432,12	14	4	
12	Plosorejo	313,70	9	2	
13	Karangrejo	176,02	12	2	
14	Grogolsari	128,00	8	3	
15	Jetak	116,00	8	1	
16	Triguno	381,61	18	3	

17	Kepohkencono	1,277,84	24	8	
18	Bodeh	148,09	10	2	
19	karangwotan	1,099,15	27	4	
20	Wateshaji	867,58	7	2	

Sumber: Kecamatan Pucakwangi dalam angka 2016

2.2.3.2. Keadaan penduduk

Kecamatan Pucakwangi memiliki jumlah penduduk sebanyak 47.919 jiwa, yang terdiri dari 23.893 jiwa laki-laki dan 24.026 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Pucakwangi tahun 2016 berjumlah 15.596 KK. Profil kependudukan Kecamatan Pucakwangi digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel II.7

Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Pucakwangi

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
1	0-4	1.533	50,1	1.532	49,9	3.065	100
2	5-9	1.720	51.7	1.604	48.3	3.324	100
3	10-14	1.809	51.2	1.725	48.8	3.534	100
4	15-19	1.645	49.4	1.684	50.6	3.329	100
5	20-24	1.257	49.7	1.268	50.3	2.525	100
6	25-29	1.094	47.6	1.204	52.4	2.298	100
7.	30-34	1.246	46.5	1.434	53.5	2.680	100
8	35-39	1.529	46.8	1.740	53.2	3.269	100
9	40-44	1.707	47.8	1.864	52.2	3.571	100
10	45-49	1.719	48.2	1.850	51.8	3.569	100
11	50-54	1.582	50.3	1.563	49.7	3.145	100
12	55-59	1.345	51.2	1.242	48.8	2.587	100
13	60-64	982	49.3	1.008	50.7	1.990	100
14	65-69	773	48.1	834	51.9	1.607	100
15	70-74	594	46.3	690	53.7	1.284	100
16	75+	653	41.8	910	58.2	1.563	100

Sumber: Kecamatan Pucakwangi dalam angka 2016

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Pucakwangi sebagai berikut

Tabel II.8

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Pucakwangi

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	4,769	5,179	9,948	21,74%
2	Belum tamat SD/MI	2,228	2,532	4,760	10,40%
3	SD/MI	7,176	7,256	14,432	31,54%
4	SMP/MTs	4,741	4,341	9,082	19,85%
5	SMA/SMK/MA	3,403	2,794	6,197	13,54%
6	DI/DII	75	81	156	0,34%
7	DIII	123	145	268	0,59%
8	S1	456	421	877	1,92%
9	S2	30	0,07%	30	0,07%
10	S3	1	1	2	0,00%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Pucakwangi sebagai berikut

Tabel II.9

Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Pucakwangi

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	5,259	4,751	10,010	21,88%
2	Mengurus rumah tangga	6	3,396	3,402	7,44%
3	Pelajar/mahasiswa	2,684	2,305	4,989	10,90%
4	Pensiunan	92	26	118	0,26%
5	PNS	271	137	408	0,89%
6	TNI	9	0	9	0,02%
7	Polri	39	2	41	0,09%
8	Pedagang	119	206	325	0,71%
9	Petani/pekebun	7,709	7,576	15,285	33,41%
10	Peternak	3	2	5	0,01%
11	Nelayan	12	0	12	0,01%
12	Industri	2	4	6	0,01%

13	Konstruksi	2	0	2	0,00%
14	Transportasi	10	2	12	0,03%
15	Karyawan swasta	961	676	1,637	3,58%
16	Karyawan BUMN	29	5	34	0,07%
17	Karyawan BUMD	4	0	4	0,01%
18	Karyawan Honorer	19	38	57	0,12%
19	Buruh harian lepas	47	29	76	0,17%
20	Buruh tani	380	441	821	1,79%
21	Wiraswasta	4,805	2,785	7,590	16,59%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Pucakwangi sebagai berikut:

Tabel II.11

Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Pucakwangi

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	22,871	22,630	45,501	99,45%
2	Kristen	106	125	231	0,50%
3	Katolik	6	6	12	0,03%
4	Hindu	0	0	0	0,00%
5	Budha	0	0	0	0,00%
6	Konghuchu	0	0	0	0,00%
7	Aliran Kepercayaan	6	2	8	0,02%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintahan nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga

ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Pucakwangi didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Pucakwangi dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kasus narkoba	na	na	na	0	0
2	Jumlah kasus pembunuhan	na	na	na	0	0
3	Jumlah kejahatan seksual	na	na	na	2	3
4	Jumlah kasus penganiayaan	na	na	na	3	3
5	Jumlah kasus pencurian	na	na	na	10	14
6	Jumlah kasus penipuan	na	na	na	2	2
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	na	na	na	0	0
8	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	na	na	na	20	24
9	Jumlah penduduk	na	na	na	46.859	47.919
10	Angka kriminalitas (8)/(9)	na	na	na	5,60	5,50

(Rumus Angka Kriminalitas: jumlah tindak criminal selama setahun dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000)

2. Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Terkait dengan ketersediaan Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Kecamatan Pucakwangi dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Pucakwangi	1	1	2
2	Mojoagung	1	1	2
3	Lumbangmas	4	4	8
4	Sitimulyo	4	4	8
5	Kleteg	5	4	9
6	Terteg	4	5	9
7	Mencon	4	6	10
8	Pelemgede	2	2	4
9	Sokopuluhan	3	2	5
10	Tegalwero	2	4	6
11	Tanjungsekar	2	4	6
12	Plosorejo	2	2	4
13	Karangrejo	3	4	7
14	Grogolsari	4	4	8
15	Jetak	2	2	4
16	Triguno	3	2	5
17	Kepohkencono	2	2	4
18	Bodeh	2	3	5
19	karangwotan	2	4	6
20	Wateshaji	6	4	10

3. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Pucakwangi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Evaluasi capaian kinerja pelayanan kecamatan Pucakwangi periode 2012-2017 sebagai berikut.

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Pucakwangi	1	1	2
2	Mojoagung	1	1	2
3	Lumbangmas	4	4	8
4	Sitimulyo	4	4	8

5	Kleteg	5	4	9
6	Terteg	4	5	9
7	Mencon	7	6	13
8	Pelemgede	2	2	4
9	Sokopuluhan	3	2	5
10	Tegalwero	2	2	4
11	Tanjungsekar	2	3	5
12	Plosorejo	2	2	4
13	Karangrejo	3	4	7
14	Grogolsari	2	2	4
15	Jetak	3	2	5
16	Triguno	2	2	4
17	Kepohkencono	4	3	7
18	Bodeh	2	2	4
19	karangwotan	3	4	7
20	Wateshaji	2	3	5

Tabel T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PUCAKWANGI
KABUPATEN PATI

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	target IKK	Target	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				Indikator	Perangkat Daerah Tahun ke-					Tahun ke-					pada Tahun ke-				
				Lainnya	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Angka Kriminalitas		20		0	0	0	0	20	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0.75
2	Jumlah pos kampling aktif dibagi jumlah pos kampling yang ada x 100%		100		0	0	0	0	100	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0.91
3	Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%		625		0	0	0	0	625	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0.48
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi		100		0	0	0	0	100	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0.15
5	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100		0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	1
6	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten		11		0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	1
7	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		10		0	0	0	0	10	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0.5

8	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	1
9	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	1
10	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0.7
11	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0.25
12	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0.8
13	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0.9
14	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0.8
15	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0.9

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Pucakwangi sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada 2016 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Pucakwangi sebagaimana tabel berikut.

Tabel T-C.24.

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PUCAKWANGI
KABUPATEN PATI**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	NA	NA	NA	NA	110.562	NA	NA	NA	NA	110.562	NA	NA	NA	NA	100		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	NA	NA	NA	NA	199.875	NA	NA	NA	NA	199.875	NA	NA	NA	NA	100		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	NA	NA	NA	NA	10.500	NA	NA	NA	NA	10.500	NA	NA	NA	NA	100		
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	NA	NA	NA	NA	4.060	NA	NA	NA	NA	4.060	NA	NA	NA	NA	100		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	NA	NA	NA	NA	53.170	NA	NA	NA	NA	53.170	NA	NA	NA	NA	100		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	NA	NA	NA	0	11.351	NA	NA	NA	NA	11.351	NA	NA	NA	NA	100		
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	NA	NA	NA	NA	3.740	NA	NA	NA	NA	3.740	NA	NA	NA	NA	100		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	NA	NA	NA	4.930	NA	NA	NA	NA	4.930	NA	NA	NA	NA	100		
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	NA	NA	NA	12.217	NA	NA	NA	NA	12.217	NA	NA	NA	NA	100		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik	NA	NA	NA	NA	2.645	NA	NA	NA	NA	2.645	NA	NA	NA	NA	100		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pucakwangi

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Pucakwangi merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Pucakwangi kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datan (2017-2022) seagai berikut.

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru. Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprograman bergerak ke arah Smart City memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas). Fokus pengembangan pelayanan

kurun lima tahun ke depan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.